

BAB II

KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Untuk menganalisis fenomena akuntabilitas pada pegawai pada Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan pemahaman konseptual yang kokoh. Oleh karena itu, Bab ini menguraikan berbagai teori dan hasil penelitian yang relevan. Fokus utama kajian pustaka ini adalah untuk menggali lebih dalam konsep akuntabilitas dan faktor-faktor yang memengaruhinya, yakni kompetensi pegawai, implementasi sistem pengendalian intern. Selain itu, dianalisis pula bagaimana SIPD berfungsi sebagai variabel moderasi dalam dinamika hubungan tersebut. Kajian ini diakhiri dengan penyusunan kerangka pemikiran logis yang menjadi landasan bagi perumusan hipotesis penelitian.

2.1.1. Kompetensi

Dalam menghadapi tantangan profesi yang semakin kompleks, terutama dengan adanya beban kerja digital, seorang pegawai secara konstan dihadapkan pada situasi yang menuntut adanya kompetensi. Oleh karena itu, bagian ini membahas landasan teoretis mengenai kompetensi pegawai, dimensinya, dan keterkaitannya dengan akuntabilitas sebagai dasar untuk membangun hipotesis penelitian.

2.1.1.1. Pengertian Kompetensi Pegawai

Dalam penelitiannya (Wuim-pam, 2014) menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Kompetensi juga dapat dipandang sebagai seperangkat perilaku terdefinisi yang menyediakan panduan terstruktur dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan perilaku pada masing-masing karyawan. Kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut pribadi yang dapat diamati maupun diukur berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan, dan pada akhirnya menghasilkan kesuksesan organisasi.

Selanjutnya dalam penelitian (J. Kim & Jung, 2022) Tingkat kompetensi adaptabilitas dapat mendukung hasil positif yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kerja dan kesuksesan karier. Kompetensi ini juga dapat memfasilitasi hasil organisasi, seperti pembelajaran, manajemen perubahan, serta pemenuhan ekspektasi pelanggan yang terus berubah.

Berikutnya penelitian (Nurpala & Arrozi, 2023) Kompetensi mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang, organisasi (kelembagaan), atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya.

Kemudian penelitian (Sinosi et al., 2025) Pegawai yang kompeten, khususnya di unit keuangan pemerintah daerah, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat proses pengambilan keputusan. Kompetensi tidak terbatas pada latar belakang pendidikan semata, tetapi juga mencakup pelatihan berkelanjutan, pengalaman praktis, serta pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah.

Selanjutnya (Dubois & Rothwell, 2000) menjelaskan bahwa kompetensi telah tumbuh dan menjadi perhatian yang dapat membedakan antara yang memiliki kompetensi dengan yang standar saja. Dengan kata lain kompetensi adalah setiap pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, atau pribadi yang menjadi karakteristik seseorang yang mempengaruhi kesuksesan kinerja. (David D Dubois, 2004) mengungkapkan bahwa kompetensi merupakan karakteristik bahwa individu memiliki dan menggunakannya dengan cara yang konsisten dan sesuai untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Karakteristik ini meliputi pengetahuan, keterampilan, aspek citra diri, motif sosial, ciri-ciri, pola pikir, pikiran-set, dan cara berpikir, merasa, dan bertindak. Kompetensi membentuk dasar dari manajemen SDM berbasis kompetensi praktek.

Selanjutnya (Arribas-Aguila et al., 2024) kompetensi sebagai sekumpulan perilaku yang homogen yang merupakan konsekuensi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain individu. Penelitian dari (P et al., 2024) berdasarkan teori yang di ungkapkan oleh

Wherington bahwa kompetensi merupakan kepribadian seluruh tingkah laku seseorang yang diintegrasikan, sebagaimana yang tampak pada orang lain yang bukan hanya melekat pada diri seseorang tapi lebih merupakan hasil dari pada suatu pertumbuhan yang dalam suatu lingkungan kultural. *Boundary approach of competence* sangat bergantung pada sudut pandang *konstruktivis*. Pandangan ini menyatakan bahwa pencarian satu makna absolut dari kompetensi ditinggalkan, dan sebaliknya definisi kompetensi dinilai berdasarkan tingkat viabilitasnya. Artikel ini mengusulkan tiga variabel untuk meningkatkan viabilitas tersebut, yaitu: individu (*people*), tujuan (*goal*), dan konteks (*context*). Spencer dan Spencer, yang mengembangkan lebih lanjut karya asli Boyatzis, mendefinisikan kompetensi sebagai suatu karakteristik yang mendasari individu yang memiliki hubungan kausal dengan kinerja efektif dan/atau unggul yang mengacu pada kriteria tertentu dalam suatu pekerjaan atau situasi (Chouhan & Srivastava, 2014). Kompetensi berasal dari kata Latin *competentia* yang berarti “berwenang untuk menilai” sekaligus “memiliki hak untuk berbicara” (Caupin et al., 2006: 9). Kamus bahasa Inggris mendefinisikan kata *competence* sebagai keadaan cukup sesuai atau layak. Mencoba menarik garis yang jelas antara istilah populer seperti *proficiency*, *capability*, *capacity*, *competence*, *competency/competencies* bahkan lebih sulit dan menimbulkan kebingungan (lihat contoh dalam Byham & Moyer, 2000; Cooper, 2000; Mirabile, 1997). Mereka yang berupaya menelaah kompetensi segera menyadari adanya ketiadaan definisi, komposisi, dan metodologi yang seragam, yang tentu saja mengarah pada kesalahpahaman, kebingungan, dan pemborosan (Cooper, 2000; Dalton, 1997). Makna yang didefinisikan oleh kamus standar bersifat luas, samar, dan tersirat sehingga dapat ditafsirkan dengan berbagai cara (2014). Adapun fitur- fitur dasar kompetensi dari uraian di atas antara lain sebagai berikut:

1. Kompetensi berasal dari peran profesional nyata dan pekerjaan dan didasarkan pada keseluruhan kerja karyawan dalam organisasi. Peran karyawan berasal dari tujuan organisasi dan kebutuhan masa depan saat ini dan dekat dari rencana.

2. Kompetensi adalah sekelompok pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang memungkinkan karyawan untuk melakukan peran dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan kerja saat ini. Jadi, itu adalah interwoven dengan rencana bisnis inti dan strategi organisasi.
3. Kompetensi dan kemahiran tingkat di setiap kompetensi secara obyektif didefinisikan terkait dengan standar yang diharapkan dari kinerja dan perilaku dengan mengacu bisnis inti organisasi.
4. Kompetensi yang memetakan untuk mempersiapkan kerangka kompetensi, profil kompetensi dan peta kompetensi yang digunakan untuk desain secara ilmiah dan pelaksanaan proses SDM dalam organisasi.
5. Organisasi memberikan fleksibilitas yang cukup kepada karyawan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi dan kecakapan dalam setiap kompetensi. Organisasi ini juga menyediakan otonomi untuk menggunakan kompetensi untuk meningkatkan kualitas bisnis.
6. Kompetensi secara profesional memetakan setiap peran dalam organisasi saat ini dan memiliki harapan masa depan dari pemegang posisi untuk mempertimbangkannya
7. Kompetensi berulang kali dan secara konsisten dilakukan oleh karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Kompetensi dinilai atas dasar kinerja dan kondisi di mana kompetensi ditunjukkan dan dijelaskan pada organisasi tertentu.
9. Kompetensi didefinisikan secara tepat dan terukur dalam hal kinerja. Hal ini dikembangkan menggunakan intervensi *Human Resource* yang dirancang secara ilmiah dan dikembangkan oleh karyawan untuk dinilai. Hal ini memungkinkan para profesional *Human Resource* untuk membandingkan kompetensi dan kemampuan tingkat dua atau lebih karyawan dengan baik sesuai kriteria
10. Kompetensi dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai strategi pada tingkat organisasi dan individu.

Berikutnya (Chouhan & Srivastava, 2014) kompetensi dapat digunakan untuk menerjemahkan strategi ke dalam keterampilan dan perilaku terkait

pekerjaan maupun individu yang mudah dipahami dan dengan demikian dapat dilaksanakan. Dengan pengetahuan dan pemanfaatan informasi yang terdapat dalam model kompetensi serta kesadaran akan kekuatan dan kelemahan kompetensi individu, seseorang dapat mengelola keberhasilan pekerjaan atau karier di masa depan, menavigasi jalur karier yang sedang ditempuh, atau menerapkan informasi tersebut untuk menelaah peluang karier baru dengan mempertimbangkan pemanfaatan kompetensi yang dapat dialihkan. Definisi kompetensi merupakan salah satu tugas yang paling rumit dalam penelitian bisnis, dengan kesepakatan diantara para peneliti.

Mc Clelland (1973) menyajikan data bahwa skor pencapaian tradisional dan kecerdasan mungkin tidak mampu memprediksi keberhasilan kerja, dan yang diperlukan adalah memprofilkan kompetensi yang tepat untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif serta mengukurnya menggunakan berbagai tes. Dia mendefinisikan *competence* sebagai “sifat pribadi atau seperangkat kebiasaan yang mengarah pada kinerja pekerjaan yang lebih efektif atau unggul”, dengan kata lain, “kemampuan yang memberikan nilai ekonomi yang jelas pada upaya seseorang dalam pekerjaan.”

Boyatzis (2007) mengadopsi istilah kompetensi sebagai “karakteristik mendasar dari seorang individu yang secara kausal (perubahan pada satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain) berhubungan dengan kinerja unggul dalam suatu pekerjaan.” Dia mengidentifikasi 19 kompetensi generik yang cenderung dimiliki oleh manajer yang unggul.

Rice (2006) merefleksikan pengembangan kepemimpinan di kalangan eksekutif layanan kesehatan di Amerika Serikat. Menurutnya, pengembangan kepemimpinan berbasis kompetensi tidak berlangsung begitu saja, melainkan secara sengaja berfokus pada aspirasi karier yang jelas. Sementara itu, Dia menekankan bahwa pendekatan disiplin terhadap pertumbuhan karier akan meningkatkan kinerja organisasi.

Gaspar (2012) menemukan bahwa metode seleksi berbasis kompetensi bersifat sehat, terstruktur, dan komprehensif. Kandidat dievaluasi berdasarkan kompetensi yang perlu mereka tunjukkan ketika bergabung dalam organisasi.

Dalam manajemen kinerja, sistem kompetensi mendiagnosis kebutuhan pelatihan dan pengembangan masa depan karyawan serta membantu eksekutif SDM dalam pengambilan keputusan terkait promosi dan mutasi.

(Sutarman et al., 2024) Kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya; apabila pegawai memiliki kompetensi yang tinggi, hal ini sudah pasti akan berdampak pada peningkatan hasil produksi dan produktivitas kerja karena pegawai tersebut dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.1.1.2. Kompetensi Pegawai dalam konteks Aparatur Sipil Negara

(Tishar Maghfiratika, 2022) Robbins menyatakan bahwa Pegawai ialah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis ataupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang di tetapkan oleh pemberi kerja. Pada penelitian (Sutrisno, 2020) Widjaya menyatakan bahwa pegawai adalah tenaga kerja manusia, jasmani maupun rohani (mental dan pikiran), yang bekerja dalam suatu badan, baik lembaga pemerintah maupun badan usaha. Pegawai adalah orang yang bekerja di satu lembaga (kantor, perusahaan) dan mendapatkan gaji atau upah. Pegawai merupakan penggerak utama organisasi dan sangat mempengaruhi produktivitas, kualitas kerja, dan disiplin kerja. Berikutnya seperti yang di tulis oleh (Gary Dessler, 2015) pekerja nontradisional adalah mereka yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan atau mereka yang merupakan pekerja “temporer” atau paruh waktu, atau mereka yang bekerja dalam perjanjian alternatif (seperti tim ibu-anak perempuan yang terbagi satu pekerjaan administrasi yang sama). Yang lainnya ada yang bertindak sebagai “kontraktor independen” pada proyek proyek.

Berdasarkan literatur di atas, kompetensi pegawai dapat dirumuskan sebagai kecakapan/kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku, serta karakteristik personal pendukung seperti motif, trait, dan konsep diri, yang secara langsung memengaruhi efektivitas dan kualitas

kinerja di lingkungan pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini bisa mengoperasionalkan kompetensi ke dalam dimensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, atau sesuai standar kompetensi jabatan ASN yang berlaku, dan mempertimbangkan aspek ukurannya (*knowledge, skills, attitude, motif, trait*).

Sadarmayanti mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, Keterampilan, dan Kemampuan yang berhubungan dengan Pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Toto, 2024).

2.1.1.3. Dimensi Kompetensi

Berdasarkan kajian empiris dan tinjauan literatur dimensi yang paling umum dipakai dan relevan untuk pegawai pemerintahan meliputi:

1. Kompetensi Pengetahuan (*knowledge*)

Pemahaman teoretis dan prosedural yang di perlukan adalah hukum, Peraturan Daerah, kebijakan publik, tata kelola keuangan daerah. Dengan indikator pendidikan formal, penguasaan materi tugas, pemahaman regulasi (Gilbert et al., 2024).

2. Kompetensi Keterampilan teknis/fungsional (*skills*).

Kemampuan melakukan tugas teknis sehari hari seperti pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, penggunaan aplikasi SIPD, menganalisis data. Dengan demikian Indikatornya adalah penguasaan perangkat lunak, keterampilan penyusunan dokumen, dan sertifikasi fungsional (Syihabuddin et al., 2022).

3. Kompetensi Manajerial administratif (*managerial/leaderships*).

Pada tahapan ini perencanaan, koordinasi, pengambilan keputusan, supervisi. Untuk pegawai Dinas yang bertugas pada level pengelolaan program, dimensi ini menentukan efektivitas implementasi kebijakan dan pengendalian intern. Sebagai Indikatornya adalah kemampuan

memimpin tim, perencanaan, serta kontrol mutu (Vermeeren & Van der Heijden, 2022).

4. Kompetensi Prilaku dan Sosial (*attitudes and interpersonal*).

Adalah etika kerja, integritas, komunikasi, kerjasama, orientasi pelayanan publik, Dimensi ini sangat relevan terhadap akuntabilitas publik karena berkaitan langsung dengan perilaku yang dapat memengaruhi transparansi dan kepatuhan (Feliciano et al., 2021).

5. Kompetensi digital teknologi (*Digital Competency/IT Literacy*)

Teknologi informasi termasuk pada penggunaan SIPD, atau aplikasi lain pada kepegawaian, e-reporting. Seiring digitalisasi pemerintahan, dimensi ini semakin penting untuk efektivitas tugas dan kepatuhan prosedural. Sebagai Indikator nya adalah frekuensi penggunaan, tingkat kemahiran, serta pelatihan teknologi informasi yang diikuti.

6. Kompetensi Kontekstual / Pengalaman (*Contextual & Experiential Competency*)

Pengalaman kerja, pengetahuan kontekstual lokal, pemahaman proses pemerintahan daerah yang unik. Sebagai indikatornya adalah masa kerja di unit terkait, pengalaman proyek serupa yang pernah di ikuti (Lestari et al., 2021).

2.1.1.4. Kompetensi Pegawai dalam Konteks Akuntabilitas Publik

Kompetensi pegawai (*employee civil servant competence*) dipahami sebagai gabungan pengetahuan, keterampilan (*technical & managerial*), sikap/perilaku, dan kemampuan *digital/kontekstual* yang memungkinkan pegawai melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Dalam ranah pelayanan publik, kompetensi bukan hanya menentukan kualitas output administratif, tetapi juga mempengaruhi tingkat akuntabilitas karena *procedural compliance*, kualitas pelaporan, dan pengambilan keputusan yang transparan sangat bergantung pada kompetensi pegawai. Konsep akuntabilitas publik pada literatur modern semakin dipandang multi-dimensi dan kontekstual bukan hanya sekadar mekanisme *principal agent* tradisional, sehingga kompetensi individual menjadi salah satu pilar penting untuk

mewujudkan akuntabilitas organisasi publik. Pada literatur menunjukkan beberapa mekanisme bagaimana kompetensi pegawai mempengaruhi akuntabilitas publik yaitu:

1. Akurasi dan kepatuhan prosedural

Pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang baik cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai standar, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan publik (Septiani & Isnawaty, 2024).

2. Efektivitas pengendalian intern.

Keterampilan manajerial dan pemahaman prosedur meningkatkan fungsi pengendalian intern (*internal control*) sehingga mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan.

3. Pemanfaatan sistem informasi

Kompetensi digital dapat mempercepat dan memperbaiki kualitas pencatatan atau pelaporan melalui SIPD, namun apabila pegawai tidak kompeten digital, potensi manfaat SIPD terhadap akuntabilitas dapat terhambat. Studi empiris nasional melaporkan bahwa keterbatasan pemahaman user menjadi salah satu kendala implementasi SIPD meskipun infrastruktur tersedia (Utami et al., 2025).

- 2.1.1.5. Indikator Kompetensi Pegawai

Kompetensi pegawai merupakan sebuah kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Kompetensi tidak hanya mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga keterampilan (*skills*) dan sikap (*attitude*) yang tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari. Pegawai yang kompeten akan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja, menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Nurpala & Arrozi, 2023).

1. Tingkat pendidikan sesuai bidang pekerjaan

Indikator ini menunjukkan kesesuaian antara latar belakang pendidikan pegawai dengan bidang tugas atau jabatan yang diemban. Pendidikan yang

relevan dengan bidang pekerjaan berperan penting dalam membentuk kemampuan konseptual dan teknis pegawai. Semakin tinggi relevansi pendidikan dengan tugas yang dilaksanakan, semakin besar pula peluang pegawai untuk memahami proses kerja, regulasi, dan kebijakan yang berlaku, sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan profesional.

2. Kemampuan menyelesaikan tugas sesuai target

Indikator ini menggambarkan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, sesuai standar kinerja, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut mencerminkan efisiensi, tanggung jawab, serta orientasi pegawai terhadap hasil kerja (*result oriented*). Pegawai yang mampu mengelola waktu, sumber daya, dan beban kerja dengan baik akan lebih produktif dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan publik

Indikator ini menilai sejauh mana pegawai memahami Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan publik yang relevan dengan pelaksanaan tugasnya. Pemahaman terhadap regulasi menjadi aspek penting agar pegawai dapat bekerja sesuai koridor hukum, mencegah kesalahan administratif, serta menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pegawai yang memahami arah kebijakan publik dapat melaksanakan program kerja sesuai dengan prioritas dan sasaran strategis pemerintah daerah.

4. Pelatihan dan pengalaman kerja

Indikator ini mencerminkan sejauh mana pegawai memperoleh pembekalan melalui kegiatan pelatihan, serta pengalaman praktis yang diperoleh selama menjalankan tugas. Pelatihan berfungsi untuk meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial sesuai dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan organisasi. Sementara itu, pengalaman kerja memperkaya kemampuan pegawai dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, serta penyesuaian terhadap situasi kerja yang kompleks.

Keduanya berkontribusi dalam membentuk profesionalitas dan kinerja pegawai yang lebih baik.

5. Keterampilan teknis dan analitis

Indikator ini menggambarkan kemampuan pegawai dalam menerapkan keahlian teknis serta melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Keterampilan teknis berkaitan dengan penguasaan alat, metode, atau prosedur kerja, sedangkan keterampilan analitis mencerminkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan merumuskan solusi berdasarkan data yang objektif. Pegawai yang memiliki keterampilan teknis dan analitis yang baik akan mampu berinovasi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, indikator kompetensi pegawai merupakan faktor penting yang menentukan kualitas pelaksanaan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kombinasi antara pendidikan yang relevan, kemampuan menyelesaikan tugas, pemahaman terhadap regulasi, pelatihan dan pengalaman kerja, serta keterampilan teknis dan analitis membentuk dasar bagi aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja organisasi.

2.1.2. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui penerapan sistem ini, organisasi sektor publik dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengendalian intern berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan, penyimpangan, serta kecurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks instansi pemerintah, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2008) menjadi instrumen utama untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian, penguatan SPIP tidak hanya mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas.

2.1.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern (*internal control system*) adalah rangkaian kebijakan, prosedur, praktik, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan wajar bahwa tujuan organisasi akan tercapai termasuk efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Kerangka prinsip yang paling sering dijadikan rujukan adalah *COSO Internal Control Integrated Framework* (2013), yang menegaskan bahwa pengendalian intern bertujuan memberikan *reasonable assurance* atas pencapaian tiga kategori tujuan: operasi, pelaporan, dan kepatuhan. (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and Internal, 2013*) *Internal control is defined in the 2013 Framework as “a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”*

Dalam konteks pemerintahan, internal control juga dimaknai sebagai usaha manajerial untuk menjamin akuntabilitas publik, mencegah penyimpangan dan korupsi, serta mendukung tata kelola yang baik. OECD menambahkan bahwa evaluasi kualitas sistem pengendalian intern pada sektor publik perlu mempertimbangkan konteks institusional dan tujuan layanan publik. (Boryczka et al., 2019) Pengendalian intern (*Internal Control/IC*) mencakup lebih dari sekadar pengendalian keuangan dan anggaran, serta lebih dari sekadar pemeriksaan kepatuhan. IC adalah seperangkat pengaturan manajerial yang meningkatkan pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif, tepat waktu, sesuai dengan standar kinerja, dan dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Bagi suatu organisasi publik, *Public Internal Control (PIC)* didefinisikan sebagai suatu proses integral, yang dijalankan oleh manajemen dan personel organisasi, yang dirancang untuk menghadapi risiko

dan mengejar peluang, serta memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian hasil dalam rangka kepentingan publik dan misi organisasi, melalui: 1) Melaksanakan operasi secara tertib, etis, ekonomis, efisien, dan efektif; 2) Menjamin relevansi, keandalan, dan integritas informasi; 3) memenuhi kewajiban akuntabilitas eksternal dan internal; 4) mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku; 5) Melindungi sumber daya dari kehilangan, penyalahgunaan, dan kerusakan; 6) Memenuhi kriteria lain dari tata kelola publik yang baik, termasuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang baik, penganggaran yang baik, serta ketangguhan dan keberlanjutan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (2023). Sebuah penelitian dari (Mediaty et al., 2025) Pemerintah yang menerapkan tata kelola yang baik akan mendorong sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan mekanisme evaluasi yang terstruktur, sehingga memungkinkan identifikasi dini atas ketidaksesuaian pelaporan. Selain itu, transparansi, yang merupakan pilar utama tata kelola yang baik, memotivasi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan laporan keuangan daerah yang lebih relevan, andal, dan patuh terhadap peraturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai organisasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai, khususnya mengenai efektivitas kegiatan, keandalan laporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2. Komponen Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah rangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, efektifitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan. Kerangka yang paling banyak dipakai sebagai acuan akademik dan praktik adalah *COSO Internal Control Integrated Framework*, yang merumuskan lima komponen interrelasi untuk internal control. Di Indonesia, konsep SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) mengadopsi struktur serupa yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Nilai integritas dan etika, komitmen manajemen terhadap kompetensi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Lingkungan pengendalian menetapkan dasar bagi semua komponen pengendalian intern lainnya. Kemudian relevansinya Lingkungan pengendalian yang lemah mempengaruhi efektivitas kontrol operasional dan laporan keuangan, sebaliknya lingkungan yang kuat mendukung budaya kepatuhan dan akuntabilitas.

2. Penilaian Risiko

Identifikasi dan analisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi (operasional, pelaporan, kepatuhan), serta penentuan respon pengendalian yang tepat. *Risk assessment* bersifat dinamis dan harus diperbarui seiring perubahan lingkungan. Kemudian Relevansi di sektor publik, penilaian risiko penting untuk mengidentifikasi area rawan penyimpangan dan kesalahan pelaporan hal ini menjadi landasan desain kontrol yang efektif.

3. Kegiatan Pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk merespon risiko otorisasi, segregasi tugas, rekonsiliasi, prosedur operasional standar,

kontrol teknologi informasi. Kegiatan ini adalah lapisan nyata yang mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan atau penyalahgunaan. Untuk akuntabilitas pelaporan, kegiatan pengendalian memastikan bahwa transaksi dicatat secara benar, disetujui, dan di audit. Khusus implementasi SIPD, control activities termasuk pengendalian akses, validasi data, dan prosedur input/output data.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang relevan harus diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasikan secara tepat waktu agar pegawai dapat melaksanakan tanggung jawab pengendalian, komunikasi juga harus berjalan secara vertikal dan horizontal. Termasuk di sini adalah kualitas sistem informasi akuntansi dan pelaporan integrasi pada SIPD, Sehingga kualitas informasi lengkap, akurat, tepat waktu kritikal bagi akuntabilitas publik terhadap SIPD berperan besar sebagai kanal informasi, namun manfaatnya tergantung kualitas data dan alur komunikasi.

5. Pemantauan

Proses berkelanjutan dan periodik untuk menilai kualitas fungsi pengendalian intern seiring berjalannya waktu melalui pengawasan manajemen, penilaian internal, dan peran audit intern/ekstern. Monitoring memastikan bahwa kontrol tetap efektif dan diperbaiki bila perlu. Pemantauan efektif mencegah akumulasi kelemahan kontrol, di pemerintahan, unit pengawasan internal, audit intern dan Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memainkan peran penting dalam monitoring.

2.1.2.3. Implementasi Sistem Pengendalian Intern di Instansi Pemerintah

Hambatan umum dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Hambatan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan kompetensi pegawai termasuk literasi SIPD, resistensi perubahan organisasi, ketidaksesuaian prosedur lama dengan mekanisme sistem baru, keterbatasan anggaran untuk penguatan pengendalian, dan lemahnya pemantauan atau

tindak lanjut temuan hasil audit. Selain itu, masalah integritas dan budaya kerja juga sering disebut sebagai faktor yang mengurangi efektivitas SPIP meskipun secara formal komponen pengendalian telah ada (Nur Anisa & Syarief, 2020).

Penelitian kuantitatif dan kualitatif pada unit pemerintah daerah menunjukkan hubungan positif antara tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan kualitas pelaporan keuangan, namun hubungan ini dimediasi/dimoderasi oleh faktor-faktor seperti kompetensi Sumber daya manusia dan kesiapan teknologi informasi SIPD (Naida et al., 2024).

Pada penelitian internasional menegaskan bahwa penerapan *COSO* pada sektor publik meningkatkan manajemen risiko dan ketaatan terhadap peraturan jika dilengkapi monitoring yang kuat dan dukungan teknologi (Chen et al., 2025).

2.1.2.4. Indikator Implementasi Sistem Pengendalian Intern

Implementasi sistem pengendalian intern merupakan proses penerapan secara menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan serta kinerja dapat diandalkan, aset pemerintah terlindungi, dan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2008), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) meliputi lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks pemerintahan daerah, implementasi SPIP menjadi instrumen penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas aparatur pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh komponen sistem pengendalian intern yang mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pimpinan serta seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian dalam

organisasi. Unsur ini mencakup integritas, nilai etika, kompetensi sumber daya manusia, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian yang baik akan menciptakan budaya kerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, kegiatan ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, identifikasi risiko operasional dan strategis, serta analisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Hasil penilaian risiko menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang langkah mitigasi dan pengendalian yang sesuai, sehingga risiko penyimpangan, inefisiensi, maupun pelanggaran regulasi dapat diminimalisasi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan dan risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola dengan baik. Kegiatan ini meliputi penerapan prosedur kerja, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pemisahan fungsi, dan pengamanan aset. Pelaksanaan kegiatan pengendalian yang konsisten akan mendukung keandalan pelaporan keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Informasi dan Komunikasi

Indikator ini menggambarkan sejauh mana organisasi mampu menghasilkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan dan andal kepada pihak internal maupun eksternal. Sistem informasi yang efektif mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan dua arah antara pimpinan

dan pegawai berperan penting dalam memastikan bahwa setiap individu memahami tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pengendalian intern.

5. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa mekanisme pengendalian berjalan sebagaimana mestinya. Proses ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan melekat, audit internal, serta reviu oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Hasil pemantauan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian, guna meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

6. Faktor Pendukung Implementasi

Faktor pendukung implementasi mencakup komitmen pimpinan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan teknologi informasi, serta kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengendalian intern. Implementasi SPIP yang efektif membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, pelatihan berkelanjutan, serta koordinasi lintas unit kerja. Faktor pendukung ini menjadi penentu utama keberhasilan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.3. Keterlibatan Publik

Keterlibatan publik merupakan salah satu konsep utama dalam kajian tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Konsep ini berakar pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi antara pemerintah dan warga negara dalam mewujudkan layanan publik yang efektif dan responsif. Perkembangan demokrasi deliberatif dan teknologi informasi semakin memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipatif, baik secara langsung maupun berbasis digital. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai keterlibatan publik menjadi penting untuk ditelaah,

mengingat perannya yang strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendorong akuntabilitas kinerja sektor publik. Kajian pustaka mengenai keterlibatan publik diperlukan untuk mengidentifikasi konsep, dimensi, indikator, serta temuan empiris yang relevan agar dapat menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini.

2.1.3.1. Pengertian Keterlibatan Publik

Keterlibatan publik merupakan pilar utama dalam paradigma *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini mengasumsikan bahwa keterlibatan warga negara tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan publik, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Dalam literatur internasional, keterlibatan publik dipandang sebagai instrumen penting yang memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan (Nielsen et al., 2021). Dalam konteks pemerintahan daerah, keterlibatan publik menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas perencanaan pembangunan serta tuntutan untuk menghadirkan tata kelola yang lebih responsif, adaptif, dan akuntabel. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas administratif, tetapi komponen strategis untuk memastikan bahwa kepentingan publik tercermin dalam pengambilan keputusan.

Secara konseptual, pemahaman mengenai keterlibatan publik telah berkembang seiring waktu. Menurut (Arnstein, 1969), melalui model klasik *Ladder of Citizen Participation*, mengidentifikasi delapan tingkatan partisipasi mulai dari manipulasi hingga kendali warga (*citizen control*). Model ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk partisipasi bersifat setara dan bermakna, melainkan menuntut adanya redistribusi kekuasaan agar warga dapat terlibat secara substantif dalam menentukan arah kebijakan. Kontribusi Arnstein menjadi dasar penting bagi kajian teoritis berikutnya karena menegaskan bahwa partisipasi publik harus dipahami dari aspek kualitas, bukan hanya kuantitas kehadiran atau pelibatan simbolik.

Selain itu (Rowe, G., & Frewer, 2005) memperluas diskusi tersebut dengan membedakan keterlibatan publik ke dalam tiga kategori fungsional utama: *communication*, *consultation*, dan *participation*. Klasifikasi ini memberikan landasan analitis yang kuat untuk menilai tingkat interaksi dan alur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, komunikasi satu arah yang hanya bersifat informatif sering kali tidak cukup untuk menghasilkan representasi publik yang bermakna. Sebaliknya, bentuk konsultasi dan partisipasi dua arah memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang dapat memengaruhi keputusan pemerintah. Tipologi ini membantu peneliti memahami dinamika dan efektivitas berbagai bentuk keterlibatan publik dalam kebijakan lokal maupun sistem informasi pemerintahan daerah.

Menurut (Fung, 2012) kemudian memperkaya teori partisipasi publik melalui model *Democracy Cube* yang menawarkan kerangka evaluatif mengenai siapa yang berpartisipasi, bagaimana mereka berpartisipasi, dan sejauh mana otoritas keputusan diberikan kepada peserta. Kerangka ini menekankan bahwa kualitas partisipasi dipengaruhi oleh inklusivitas proses, bentuk komunikasi yang terjadi, dan alokasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks SIPD, model ini relevan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut mampu menjadi media bagi keterlibatan publik, baik dalam hal akses informasi maupun dalam mekanisme partisipatif pada tahapan perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, teori ini menawarkan perspektif analitis yang kuat untuk menilai efektivitas partisipasi publik dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan.

Selain perspektif demokrasi partisipatif, (Jasanoff, 2003) melalui kerangka *technologies of humility* menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam menghadapi kompleksitas, ketidakpastian, dan risiko dalam tata kelola publik. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa partisipasi publik tidak hanya diperlukan untuk legitimasi, tetapi juga untuk menangkap nilai-nilai moral, preferensi sosial, dan dampak kebijakan yang tidak dapat sepenuhnya ditentukan melalui analisis teknokratis.

Kemudian menurut (Shin et al., 2024) alat digital memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi warga ketika didukung oleh desain institusional yang tepat. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai opsi dan keterbatasan alat digital sangat penting untuk mencapai tujuan tertentu serta memperlancar tahapan pembuatan kebijakan bersama warga.

2.1.3.2. Dimensi Keterlibatan Publik

Keterlibatan publik merupakan proses partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan pemerintah, menekankan tingkat interaksi dan pengaruh warga negara dalam tata kelola publik. Berdasarkan pengembangan teori tersebut, keterlibatan publik dapat diuraikan ke dalam beberapa dimensi berikut:

1. Dimensi Akses Informasi

Pada dimensi akses informasi merujuk pada sejauh mana pemerintah menyediakan informasi publik yang terbuka, akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Akses informasi merupakan prasyarat dasar keterlibatan publik, karena partisipasi yang bermakna hanya dapat terjadi apabila masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Bertot, Jaeger, dan Grimes (2010) menyatakan bahwa akses informasi publik merupakan bentuk transparansi pemerintah yang memungkinkan masyarakat untuk memantau, mengevaluasi, serta menuntut akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan digital, keterbukaan informasi melalui sistem informasi pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, 2014). Pada penelitian tingkat nasional, yang dilakukan oleh Mardiasmo dan Barnes (2019) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas sektor publik di pemerintah daerah.

2. Dimensi Konsultasi Publik

Dimensi konsultasi publik mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam bentuk penyampaian pendapat, masukan, kritik, dan aspirasi terhadap

kebijakan atau program pemerintah yang sedang dirumuskan atau dilaksanakan. Konsultasi publik menempatkan masyarakat sebagai pihak yang didengar, meskipun kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada pemerintah. OECD (2001) mendefinisikan konsultasi publik sebagai proses dua arah di mana pemerintah secara aktif meminta pandangan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Kemudian Fung (2015) menegaskan bahwa konsultasi publik meningkatkan kualitas kebijakan karena keputusan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan publik. Kemudian Pratama dan Samudra (2021) menemukan bahwa mekanisme konsultasi publik yang efektif dapat memperkuat legitimasi kebijakan serta mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.

3. Dimensi Kolaborasi dan Kemitraan

Pada dimensi kolaborasi dan kemitraan menunjukkan tingkat keterlibatan publik yang lebih tinggi, di mana masyarakat tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga terlibat secara aktif bersama pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah merupakan inti dari *collaborative governance*, yang bertujuan menciptakan nilai publik melalui kemitraan yang setara. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat akuntabilitas melalui tanggung jawab bersama. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat berkontribusi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program publik.

4. Dimensi Pengaruh Terhadap Keputusan

Pada dimensi pengaruh terhadap keputusan menggambarkan sejauh mana aspirasi dan partisipasi dalam masyarakat benar-benar memengaruhi hasil akhir kebijakan atau keputusan pemerintah. Dimensi ini menekankan substansi keterlibatan publik, bukan sekadar formalitas partisipasi. Arnstein (1969) dalam teori *Ladder of Citizen Participation* menyatakan bahwa

partisipasi yang bermakna terjadi ketika masyarakat memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Hidayat (2022) dalam jurnalnya menemukan bahwa semakin besar pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, semakin tinggi tingkat akuntabilitas kebijakan publik yang dihasilkan.

5. Dimensi Pemberdayaan Publik

Dimensi pemberdayaan publik merujuk pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Nabatchi dan Leighninger (2015), pemberdayaan publik merupakan tahap lanjutan dari keterlibatan publik yang bertujuan menjadikan masyarakat sebagai aktor aktif dalam menciptakan nilai publik. Pemberdayaan tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga transformasional, karena mendorong masyarakat untuk berperan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Di Indonesia, penelitian oleh Ritonga et al. (2019) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

6. Dimensi Keterjangkauan dan Inklusi

Dimensi keterjangkauan dan inklusi menekankan bahwa keterlibatan publik harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Keterlibatan publik yang inklusif memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Quick dan Feldman (2011) menyatakan bahwa keterlibatan publik yang inklusif meningkatkan legitimasi kebijakan dan mencegah dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Penelitian nasional oleh Setyawan dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa inklusivitas partisipasi publik memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah.

2.1.3.3. Indikator Keterlibatan Publik

Keterlibatan publik merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk keterlibatan publik mengalami pergeseran dari mekanisme konvensional menuju partisipasi berbasis digital. Pemanfaatan alat digital dalam proses kebijakan publik dipandang memiliki potensi besar dalam memperluas ruang partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Menurut (Shin et al., 2024) alat digital memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi warga ketika didukung oleh desain institusional yang tepat. Desain institusional tersebut mencakup pengaturan kebijakan, prosedur, serta kapasitas kelembagaan yang memungkinkan partisipasi publik berlangsung secara efektif. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai pilihan dan keterbatasan alat digital menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa partisipasi publik dapat diarahkan sesuai dengan tujuan kebijakan serta terintegrasi ke dalam tahapan pembuatan kebijakan bersama masyarakat.

Berdasarkan kerangka konseptual dan temuan empiris yang dikemukakan oleh (Shin et al., 2024), keterlibatan publik melalui pemanfaatan alat digital tidak hanya diukur dari tingkat keikutsertaan masyarakat, tetapi juga dari kualitas proses partisipasi yang terjadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini keterlibatan publik dioperasionalkan ke dalam lima indikator utama sebagai berikut:

1. Aksesibilitas partisipasi digital

Aksesibilitas partisipasi digital merujuk pada sejauh mana masyarakat memiliki kemudahan dan kesempatan yang setara untuk mengakses serta memanfaatkan alat digital dalam proses kebijakan publik. Desain institusional yang inklusif diperlukan agar partisipasi digital tidak hanya melibatkan kelompok tertentu, melainkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Kesesuaian alat digital dengan tujuan kebijakan

Kesesuaian alat digital dengan tujuan kebijakan menunjukkan kemampuan institusi publik dalam memilih dan menggunakan alat digital yang sejalan dengan tujuan keterlibatan publik pada setiap tahapan pembuatan kebijakan. Setiap alat digital memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, sehingga pemilihan alat yang tidak tepat berpotensi mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat.

3. Kualitas interaksi dan kolaborasi

Kualitas interaksi dan kolaborasi mencerminkan tingkat komunikasi dua arah dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang difasilitasi melalui alat digital. Dalam kerangka *collective intelligence*, keterlibatan publik yang efektif ditandai oleh adanya pertukaran informasi, diskusi yang konstruktif, serta kolaborasi dalam merumuskan solusi kebijakan.

4. Integrasi partisipasi ke dalam proses pengambilan keputusan

Integrasi partisipasi ke dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan sejauh mana masukan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui alat digital benar-benar diakomodasi dan dimanfaatkan dalam mekanisme pengambilan keputusan formal.

5. Transparansi dan akuntabilitas proses partisipasi

Transparansi dan akuntabilitas proses partisipasi menggambarkan keterbukaan pemerintah dalam mengelola partisipasi publik berbasis digital serta pertanggungjawaban atas hasil keterlibatan masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil partisipasi, serta penyampaian umpan balik kepada masyarakat, merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan partisipasi warga.

2.1.4. Akuntabilitas

Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan transparansi publik yang semakin meningkat, akuntabilitas menjadi prinsip fundamental yang harus diwujudkan oleh setiap organisasi sektor publik. Pemerintah sebagai pengelola

sumber daya negara dituntut untuk tidak hanya melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, serta penggunaan anggaran kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi ukuran sejauh mana aparatur pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai integritas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep akuntabilitas menjadi penting sebagai dasar dalam menilai kinerja organisasi, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.4.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, penggunaan sumber daya, serta hasil kinerja kepada pihak-pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban *accountability holders*. Konsep ini memiliki dua dimensi utama: (1) akuntabilitas sebagai mekanisme *institutional arrangements, reporting*, kontrol, dan (2) akuntabilitas sebagai nilai etos *virtue*. Pemisahan ini penting untuk memahami perbedaan antara kewajiban formal dan norma sosial/etis dalam praktik pemerintahan (Mark, 2010).

Kemudian akuntabilitas adalah kewajiban organisasi publik untuk melaporkan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan secara benar, transparan, dan sesuai peraturan seperti aturan anggaran, standar akuntansi publik. Fokusnya pada pelaporan keuangan, kepatuhan anggaran, dan audit eksternal (BPK/BPKP). Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan diukur melalui kualitas laporan keuangan, realisasi anggaran, dan opini audit (Quintyn et al., 2005).

Selanjutnya Akuntabilitas selalu terkait dengan tata kelola yang baik, yang mengandung makna bahwa organisasi publik yang menyelenggarakan urusan publik, mengelola dana publik, serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia harus dilakukan secara bebas dari penyalahgunaan dan korupsi, serta menaati hukum (Aziz et al., 2015).

Hasil penelitian lainnya akuntabilitas, sebagai prinsip utama tata kelola yang baik, mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas dan penggunaan sumber daya mereka kepada para pemangku kepentingan, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar akuntansi (Mediaty et al., 2025).

Selanjutnya akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Qak & Holifah, 2024).

Akuntabilitas publik difokuskan terutama pada akuntabilitas keuangan dan transparansi pelaporan (*financial reporting*), audit internal dan eksternal, serta keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam memastikan bahwa informasi keuangan dan non-keuangan dapat diakses dan dipahami oleh publik (Sari & Muslim, 2023).

Akuntabilitas administratif kewajiban aparat/birokrasi untuk menjalankan prosedur, peraturan internal, serta mekanisme pengawasan intern inspektorat, sebagai pengendalian intern dan untuk melaporkan tindakan administratif kepada atasan atau lembaga pengawas. Ini berhubungan erat dengan mekanisme pengendalian internal dan tata kelola birokrasi (Wicaksono, 2015).

Selanjutnya Akuntabilitas keuangan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan publik termasuk pembuatan, pelaksanaan, pelaporan anggaran, dan audit eksternal. Indikator umum akurasi laporan keuangan (LKPD), kepatuhan anggaran, temuan audit BPK/inspektorat, transparansi anggaran, dan mekanisme pelaporan fiskal. Literatur PFM (public financial management) dan artikel di jurnal akuntansi publik menekankan bahwa akuntabilitas keuangan diperlukan untuk menjaga pengelolaan dana publik

yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan (Expenditure & Accountability, 2019).

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2014).

International organization of supreme Audit Institutions atau yang lebih di kenal INTOSAI merumuskan akuntabilitas sebagai kewajiban entitas atau pejabat publik untuk (1) menjawab atas tanggung jawab fiskal, manajerial, dan program yang dipercayakan; dan (2) melaporkan penggunaan sumber daya serta hasil kegiatan kepada pihak yang memberi mandat. Definisi ini tidak membatasi akuntabilitas pada laporan keuangan semata, melainkan memperluasnya ke pertanggungjawaban atas kinerja program dan kepatuhan terhadap hukum/aturan (2007).

Kemudian akuntabilitas program berhubungan dengan pertanggungjawaban atas hasil program atau layanan publik apakah program mencapai tujuan yang diharapkan, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk output/outcome yang dijanjikan. Evaluasi program dan mekanisme monitoring evaluation menjadi pusatnya. Literatur evaluasi menekankan bahwa pengukuran kinerja program (output/outcome) adalah bentuk penting akuntabilitas publik, terutama untuk menilai dampak kebijakan (Han, 2023).

Akuntabilitas hukum yang menekankan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan norma hukum lainnya; melibatkan mekanisme kontrol hukum seperti pengadilan, ombudsman, auditor negara, serta mekanisme sanksi administratif atau pidana bila terjadi penyimpangan. Ini menjamin bahwa tindakan pemerintahan tidak bertentangan dengan peraturan dan hak warga (de Boer, 2023).

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Presiden, 2014).

2.1.4.2. Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan

United Nations Development Programme memandang *governance* sebagai mekanisme, proses, dan institusi yang melalui itu warga negara dan kelompok menyatakan kepentingan, menuntut hak, memenuhi kewajiban, dan menyelesaikan konflik. Dari dokumen dan pedoman program UNDP muncul sekumpulan prinsip umum *good governance* yang sering dijadikan rujukan di penelitian kebijakan publik (2011):

1. Partisipasi (*Participation*) keterlibatan warga/aktor terkait dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; partisipasi bisa bersifat langsung maupun lewat perwakilan.
2. *Rule of Law* (Penegakan Hukum) penegakan hukum yang adil dan independen; perlindungan hak-hak individu serta kepastian hukum.
3. Transparansi (*Transparency*) akses terhadap informasi publik dan proses pengambilan keputusan yang jelas sehingga publik dapat mengawasi tindakan pemerintah.
4. Akuntabilitas (*Accountability*) pejabat dan institusi publik harus bertanggung jawab kepada publik dan lembaga pengawas; akuntabilitas mencakup pelaporan, penjelasan, dan konsekuensi.
5. Efektivitas & Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*) pelayanan publik dan penggunaan sumber daya harus mencapai tujuan dengan cara yang hemat dan tepat guna.
6. Kesetaraan & Inklusivitas (*Equity & Inclusiveness*) memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat dan kesempatan setara dari layanan publik.
7. Responsivitas (*Responsiveness*) pemerintahan harus peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

World Bank menekankan *good governance* sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan dan menstrukturkan pengukuran kualitas

tata kelola publik lewat kerangka yang lebih teknis dan indicator based, termasuk *Worldwide Governance Indicators (WGI)* (2025). Enam dimensi utama yang sering digunakan World Bank adalah:

1. *Voice & Accountability* kebebasan sipil, hak politik, dan kemampuan warga untuk memilih serta mengekspresikan pendapat.
2. *Political Stability & Absence of Violence* stabilitas politik dan rendahnya risiko kekerasan terhadap pemerintahan.
3. *Government Effectiveness* kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, dan implementasi kebijakan.
4. *Regulatory Quality* kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan/regulasi yang mendukung pembangunan.
5. *Rule of Law* kepastian hukum, independensi pengadilan, perlindungan hak properti.
6. *Control of Corruption* kemampuan negara mengendalikan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Akuntabilitas sebagai indikator utama tata kelola telah diidentifikasi dalam banyak studi sebagai indikator utama tata kelola yang baik, mencerminkan pertanggungjawaban keuangan dan non-keuangan serta sebagai dasar legitimasi publik dan kontrol internal pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia, penelitian empiris menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan berkontribusi signifikan terhadap indeks tata kelola pemerintahan, dan peran pengendalian intern serta pengawasan atas akuntabilitas keuangan menjadi variabel penting dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi anggaran daerah (2023).

2.1.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dipengaruhi oleh faktor internal organisasi kapasitas sumber daya manusia/kompetensi, kualitas pengendalian intern/SPIP, budaya organisasi, kepemimpinan, faktor teknologi dan sistem informasi SIPD, mekanisme eksternal audit eksternal, pengawasan legislatif/inspektorat, partisipasi publik, serta kondisi institusional dan sumber daya anggaran, infrastruktur, regulasi. studi empiris mengonfirmasi bahwa kombinasi faktor-

faktor ini menentukan seberapa efektif akuntabilitas dijalankan di pemerintahan daerah (Fan, 2025).

1. Kompetensi Pegawai

Pentingnya kompetensi pegawai pengetahuan teknis akuntansi/pelaporan, keterampilan IT, kemampuan manajerial memengaruhi kualitas pelaporan, kepatuhan prosedural, dan kemampuan menindaklanjuti rekomendasi audit semua berkontribusi pada tingkat akuntabilitas. Studi empiris di sektor publik menunjukkan hubungan positif antara kompetensi pegawai dan akuntabilitas / kinerja organisasi publik.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

SPIP adalah mekanisme internal pokok untuk memastikan kepatuhan prosedural, integritas data keuangan, dan mitigasi risiko dengan demikian berdampak langsung pada akuntabilitas finansial dan administratif. Banyak studi Indonesia menemukan hubungan positif SPIP terhadap akuntabilitas/menurunnya risiko temuan audit.

3. Transparansi dan regulasi

Partisipasi public akses informasi, pengaduan dan transparansi meningkatkan tuntutan akuntabilitas *downward* hal ini meningkatkan tekanan untuk memperbaiki pelaporan dan menindaklanjuti rekomendasi. Literasi publik dan saluran informasi meningkatkan *accountability ecosystem*.

2.1.4.4. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menuntut setiap entitas publik, termasuk pemerintah daerah, untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas tidak hanya mencerminkan kewajiban formal untuk menyampaikan laporan, tetapi juga menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan keandalan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, penerapan akuntabilitas berarti memastikan bahwa setiap kegiatan dan kebijakan yang dijalankan memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan secara efisien, serta menghasilkan laporan keuangan dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan prinsip *good governance* (Mediaty et al., 2025).

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pengelolaan keuangan publik dilakukan secara tertib, efisien, dan dapat diaudit. Laporan keuangan yang andal dan sesuai standar akuntansi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator ini menilai sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator output dan outcome yang menggambarkan keberhasilan program pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

3. Akuntabilitas Administratif

Akuntabilitas administratif menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan prosedur dan mekanisme administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap aturan birokrasi, tata naskah dinas, serta sistem pelaporan internal. Akuntabilitas administratif yang baik menjamin konsistensi pelaksanaan tugas dan mencegah terjadinya penyimpangan administratif dalam proses pemerintahan.

4. Akuntabilitas Hukum dan Prosedural

Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap kebijakan dan kegiatan berdasarkan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta prosedur yang sah. Akuntabilitas hukum memastikan bahwa seluruh keputusan pemerintah memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Penerapan akuntabilitas ini juga mendorong adanya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

5. Transparansi Informasi Publik

Transparansi informasi publik merupakan bagian integral dari akuntabilitas yang menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan akses informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau dan menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsinya dengan baik. Transparansi ini juga berperan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

6. Tanggung Jawab dan Integritas Aparatur

Indikator ini mencerminkan komitmen moral dan etika pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas secara jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Aparatur yang memiliki integritas tinggi akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan profesional dan menjauhkan diri dari perilaku menyimpang. Tanggung jawab dan integritas menjadi pilar penting dalam membangun budaya kerja yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk pada tingkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai

instrumen utama digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SIPD dirancang untuk mendukung integrasi data dan informasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam satu sistem terpadu. Penerapan SIPD diharapkan dapat meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, memperkuat pengendalian intern, serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan mutakhir. Dengan demikian, keberadaan SIPD menjadi komponen penting dalam upaya modernisasi birokrasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2.1.5.1. Pengertian dan Latar Belakang SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup SIPD meliputi informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik (Kemendagri, 2019). Sementara itu digitalisasi di sektor publik telah digadang-gadang bukan hanya sebagai cara untuk meningkatkan layanan, tetapi juga untuk memungkinkan ketersediaan data yang lebih luas, lebih kaya, dan lebih mudah diakses, serta interaksi yang lebih baik dengan aktor lain (Agostino et al., 2022). Semua fitur ini diharapkan dapat memperkuat pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, dan hubungan dengan warga negara. *e-governance*, atau pemerintahan elektronik, adalah sebuah konsep yang berkembang pesat dalam manajemen pemerintahan di berbagai negara di seluruh dunia (Sanmukhiya C., 2019).

Konsep *e-governance* telah mengalami evolusi yang signifikan sejak awal kemunculannya pada tahun 1990-an, berubah dari sekadar transaksi elektronik sederhana menjadi sistem pemerintahan yang lebih kompleks dan terintegrasi, mencakup berbagai aspek administrasi publik (2022). *e-*

governance mencakup penggunaan berbagai teknologi informasi, seperti situs web pemerintah, aplikasi seluler, sistem layanan elektronik, dan platform komunikasi daring, untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta (2019).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sebuah keharusan yang diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 Pasal 391 (2014), di mana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah melalui sistem yang terkelola dengan baik. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 70 Tahun (2019) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD berfungsi sebagai fondasi dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah, mengintegrasikan informasi perencanaan pembangunan, dana daerah, sistem pembinaan dan pengawasan instansi di daerah, serta informasi lain yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah (2024). Kemudian (Evinita et al., 2025) akuntabilitas keuangan di negara-negara berkembang, khususnya akuntabilitas keuangan lembaga publik, menuntut pertanggungjawaban atas dana publik, baik pada lembaga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karakteristik yang dapat memengaruhi dan mengevaluasi akuntabilitas keuangan di sektor publik antara lain keterlibatan pemangku kepentingan yang terbatas serta tingginya tingkat korupsi dan kecurangan.

2.1.5.2. Fungsi dan Manfaat SIPD

Beberapa studi nasional terbaru menunjukkan bahwa SIPD memiliki fungsi penting sebagai sistem informasi terintegrasi yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan daerah.

1. Integrasi data.

SIPD memfasilitasi integrasi data keuangan, pembangunan, dan pemerintahan daerah lainnya sehingga data tidak terfragmentasi antar OPD. Hal ini memudahkan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan data yang lebih cepat tersedia, sistem yang terbuka, dan pelaporan yang lebih terstruktur, SIPD mendorong transparansi publik dan akuntabilitas keuangan daerah.

3. Efisiensi administratif dan waktu proses

SIPD mengurangi duplikasi kerja, mempercepat proses pelaporan, meminimalkan kesalahan manual, dan menghemat waktu dalam pengolahan data.

4. Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan dan Pelaporan

Informasi keuangan yang lebih akurat, lebih cepat, dan lebih dapat dipercaya, membantu dalam evaluasi kinerja OPD dan laporan keuangan daerah.

5. Mendukung Perencanaan dan Anggaran yang Lebih Baik

Dengan data historis, modul perencanaan, dan analisis informasi pembangunan, SIPD membantu OPD dalam menyusun anggaran yang lebih realistis dan cocok dengan kebutuhan daerah.

6. Peningkatan Pengawasan Internal

SIPD bisa memperkuat pengawasan internal melalui monitoring data, audit internal, dan kontrol atas input serta output laporan keuangan.

2.1.5.3. Indikator SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan pemerintahan daerah secara elektronik. Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun (2019) tentang SIPD, sistem ini bertujuan untuk menyediakan layanan informasi pemerintahan daerah yang terhubung, terpadu, dan berbasis digital, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, implementasi SIPD menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data (*data driven governance*). Melalui integrasi sistem

informasi, pemerintah daerah dapat mengelola data pembangunan, keuangan, dan kinerja secara lebih efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Integrasi dan Keterhubungan Sistem

Indikator ini mencerminkan sejauh mana seluruh subsistem informasi pemerintahan daerah, seperti perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan keuangan daerah, terhubung secara terpadu dalam satu platform elektronik. Integrasi sistem memungkinkan pertukaran data antar perangkat daerah berjalan otomatis dan konsisten, sehingga menghindari duplikasi serta meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keterhubungan ini menjadi dasar utama dalam menciptakan sistem informasi pemerintahan yang efisien dan komprehensif.

2. Ketersediaan dan aksesibilitas Data

Indikator ini mengukur kemampuan SIPD dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, mutakhir, serta mudah diakses oleh pengguna yang berwenang. Aksesibilitas data yang baik memastikan bahwa setiap unit kerja dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan data yang terbuka juga menjadi landasan bagi transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Kualitas Informasi

Kualitas informasi berkaitan dengan keandalan, ketepatan, relevansi, dan validitas data yang dihasilkan melalui sistem SIPD. Informasi yang berkualitas tinggi akan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision making*) serta meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan daerah, kualitas informasi juga mencerminkan tingkat profesionalitas dan akurasi aparatur dalam melakukan input serta verifikasi data.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data, komunikasi antar instansi, dan penyajian informasi

kepada publik. Pemanfaatan teknologi mencakup penggunaan perangkat lunak, basis data, jaringan internet, serta sistem keamanan informasi. Dengan dukungan teknologi digital, SIPD mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperkuat sistem pengawasan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Interaksi dan Kolaborasi Antar Aktor

Indikator ini menilai sejauh mana SIPD memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kolaborasi yang baik melalui sistem informasi terintegrasi akan memperkuat koordinasi kebijakan, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan daerah.

6. Dukungan Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Indikator ini menekankan bahwa SIPD berperan sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui penyediaan data yang terbuka, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri, SIPD memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawasan untuk memantau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, SIPD berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan publik yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia SIPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berperan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui enam indikator utama integrasi sistem, ketersediaan data, kualitas informasi, pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi antar aktor, serta dukungan terhadap akuntabilitas dan transparansi SIPD menjadi landasan transformasi digital dalam pengelolaan

informasi pemerintahan daerah yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Merangkum hasil penelitian relevan yang meneliti hubungan antar variabel yang ada (misalnya: hubungan kompetensi pegawai dengan akuntabilitas, implementasi sistem pengendalian intern dengan akuntabilitas, dst). Digunakan menjadi bahan rujukan dan menjadi dasar bagi penelitian ini. Berikut ini daftar penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
1	Nina Yusnita Yamin, Muhammad Rizki Lawaidjo, Ridwan (2025) <i>Moderation of Human Resource Competencies in Quality of Financial Statements: Application of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, and Control Environment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Sumberdaya Manusia • Metode analisis SEM PLS 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan • Penerapan Standar akuntansi pemerintahan an • Pemanfaatan teknologi informasi • Lingkungan pengendalian 	Penerapan SAP berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan lingkungan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM tidak signifikan sebagai variabel moderasi	<i>Journal of Ecohumanism. Department of Accounting, Universitas Tadulako, Indonesia. Volume: 4, No: 1, pp. 1539 – 1551</i> ISSN: 2752-6798 (Print) ISSN 2752-6801 (Online). DOI: https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5968
2	Ahmad Yahia Mustafa Alastal, Ali Ahmed Ateeq, Marwan Milhem, Dalili Izni Shafie (2024) <i>Corporate Governance and</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Perusahaan 	Ditemukan bahwa komponen pengendalian internal khususnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko,	Research Gate https://www.researchgate.net/publication/385171190 . DOI: 10.1007/978-3-031-71318-7_51

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
	<i>Internal Control Mechanisms: Developing a Strategic Framework</i>			<p>aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sangat penting dalam mendorong tata kelola perusahaan yang efektif. Lingkungan pengendalian membentuk dasar bagi perilaku etis, sementara penilaian risiko membantu dalam memprioritaskan dan mengelola risiko. Aktivitas pengendalian menetapkan struktur dan disiplin yang diperlukan, serta informasi dan komunikasi memastikan tersedianya informasi yang andal. Pemantauan memberikan jaminan berkelanjutan bahwa pengendalian internal berfungsi secara efektif. Selain itu, penerapan pengendalian internal yang</p>	

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
3	Mediaty , Grace T. Pontoh , Nadhirah Nagu , Rahmawati HS , Anis Anshari Mas'ud and Rozainun Haji Abdul Aziz (2025) <i>Human Competencies: Amplifying Financial Reporting Quality in Indonesian Local Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • sistem pengendalian internal • SEM PLS 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelaporan keuangan daerah • komitmen organisasi • Pemanfaatan teknologi informasi • Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 	<p>kuat dapat meningkatkan praktik tata kelola perusahaan, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan para pemangku kepentingan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang baik, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi semuanya berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. kompetensi sumber daya manusia terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas</p>	<p><i>Journal of Risk and Financial Managements.</i> https://doi.org/10.3390/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
4	Miranti Amir, Balqis, Sukri Palutturi, Indar, Aminuddin Syam, Yahya Thamrin, Anwar Mallongi (2025) <i>Analysis of the Implementation of the Local Government Information System in the Health Sector at the Health Office of Teluk Wondama Regency, West Papua</i>	• Implementasi SIPD	• Efektivitas program	pelaporan keuangan. Namun, efek moderasi ini tidak signifikan pada hubungan yang melibatkan tata kelola yang baik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Input SDM tidak memadai, sistem perlu perbaikan	<i>Management (Montevideo)</i> . 2025; 3:241 doi: 10.62486/agma2025241 ISSN: 3046-4048
5	Puji Wibowo and ETTY Murwaningsari (2024) <i>Factors influencing non-tax revenue sustainability in Indonesian government institutions: the mediating role of accountability</i>	• Akuntabilitas • Pengendalian Intern • Kompetensi SDM • Sem-Pls	• Keberlanjutan PNB	Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Positif terhadap keberlanjutan PNB, Akuntabilitas juga berperan sebagai faktor mediasi yang efektif antara kepemimpinan	<i>Cogent Business & Management 2024, VOL. 11, NO. 1, 2303788. Department of Accounting and Business, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia</i> https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2303788

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
6	Nur Fitri Dewia, S. M. Ferdous Azama and Siti Khalidah Mohd Yusoff (2019) <i>Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Kompetensi Sumber Daya Manusia • Sistem Pengendalian Intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • SPSS 2.0 	berkelanjutan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung penguatan keberlanjutan PNBP Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.	<i>Management Science Letters</i> homepage: www.GrowingScience.com/msl Post Graduate Centre, Management and Science University, University Drive, Off Persiaran Olahraga, Section 13, 40100, Selangor, Malaysia. doi: 10.5267/j.msl.2019.5.013
7	Alim Ashari Muttaqien, Jamaluddin Majid, Nur Rahma Sari	• Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Organisasi • SPSS 2.1 	Kompetensi berpengaruh positif, signifikan berpengaruh positif terhadap	<i>Indonesian Journal of Taxation and Accounting</i> . http://journal.lontaradigitech.com/index.php/I

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
	(2024) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating	<ul style="list-style-type: none"> •Kompetensi sumber daya manusia •Sistem pengendalian intern 		akuntabilitas, komitmen organisasi memoderasi terhadap Kompetensi dan akuntabilitas, Komitmen organisasi memoderasi hubungan SPI dengan akuntabilitas	<i>JOTA</i> P-ISSN: 2988-4896. Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
8	Nurpala, Arrozi (2023) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi sumber daya manusia • SIPD • Sistem Pengendalian intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan daerah • Uji regresi linier berganda 	kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Volume 11, No. 2, Tahun 2023. https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx .
9	Lenny Leorina Evinita, Cecilia Lely Kewo, Joseph Philip Kambey (2025) <i>Measuring the Factors Affecting the Quality of Public Sector Financial Reports to Improve Financial Accountability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pengendalian Intern • Sem Pls • Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi akuntansi • Kualitas laporan keuangan • Kompetensi manajerial 	SIA berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, implementasi pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi manajerial berpengaruh	<i>General Management</i> Vol. 26, No. 205/ Mar 2025, ISSN:1582-2559, DOI: 10.47750/QAS/26.205.41, Universitas Negeri Manado, Indonesia,

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
10	Sayidah Maryam Sinosi1, Andi Prayitno2, Nirwana3, Darmawati4 (2025) <i>Human Resource Competence and Internal Control Systems in Regional Government Financial Reporting: A Systematic Review</i>	<ul style="list-style-type: none"> • kompetensi sumber daya manusia (SDM) • sistem pengendalian intern 	Kualitas Laporan Keuangan	positif terhadap kualitas laporan keuangan Kompetensi SDM, khususnya dalam pengetahuan keuangan, pengalaman profesional, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, berpengaruh signifikan dalam meningkatkan akurasi pelaporan keuangan	Jurnal Ilmu akuntansi Accounting Profession Program, Universitas Hasanuddin. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Invoice/ Volume 7 No 1
11	Nasrun Raida (2024) <i>Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan: Pentingnya kompetensi SDM</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SIPD • Sistem pengendalian intern Pemerintahan • Kompetensi SDM • Metode analisis SEM-PLS 	• Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan SPIP dan SIPD Berpengaruh positif dan signifikan, kompetensi SDM memperkuat hubungan SPIP dan SIPD	Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Doi10.26623/slsi.v22i4.10554
12	Windi Nindya Zaida, Erlina, Keulana Erwin (2022) <i>Factors That Influence the Financial Statements' Quality of the Regional Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • SIPD • Akuntabilitas • SPI • SEM-PLS 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen organisasi • Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 	kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pemerintah daerah, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh	<i>International Journal of Research and Review</i> . Vol.9; Issue: 7; July 2022. Website: www.ijrrjournal.com . E-ISSN: 2349-9788; P-ISSN: 2454-2237

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
	<i>of South Tapanuli Regency</i>			positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	
13	Rizal Nur Arif, Amrie Firmansyah (2024) Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	<ul style="list-style-type: none"> • SIPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses akuntansi dan pelaporan keuangan • Metode triangulasi 	Hasil penelitian Kabupaten Karanganyar siap dalam implementasi SIPD	AKUNTANSIKU Volume 3 No.1, 2024 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
14	Dina Fitriasari (2024) Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi pemerintah daerah • Kompetensi sumberdaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Laporan Keuangan 	Berdasarkan hasil penelitian, penerapan aplikasi SIPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai Thitung sebesar 4.110 dan nilai signifikansi 0.001. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai Thitung sebesar 3.762 dan nilai	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan – Indonesia Mandiri Jurnal Bina Akuntansi, Bulan Juli 2024 Vol.11 No.2 Hal 34-54

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
15	Sindi Depi Maharani, Mulyaningtyas (2025) Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sumber Brantas	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Internal • Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Desa 	signifikansi 0.001. Perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, SPI berpengaruh positif terhadap akuntabilitas	Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3
16	Yovani, Halkadri Fitra (2025) Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Payakumbuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian intern • Kompetensi sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi akuntansi • Kualitas laporan keuangan • Data analisis regresi linier berganda 	Penerapan SIA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi Sumberdaya berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol 7 Nomor 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padang, E-ISSN:2656-3649 (Online)
17	Arttika Rahmasari, Doddy Setiawan (2022) Maturity of Internal Control System, the Capability of Internal Auditors, and Performance Accountability in Local Governments	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Maturitas internal control system • Kapabilitas Internal auditor 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan sistem pengendalian internal pemerintah, kapabilitas auditor internal, dan opini audit berpengaruh positif terhadap akuntabilitas	Jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas 11 maret Central Java DOI: 10.28986/jtaken.v8i2.830

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
18	Roery Ayu Mayangsari Riyadi (2023) Effectiveness of Competence Development of State Civil Apparatus on Civil Servant Performance of Witness and Victim Protection Agency	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja individu • Teknik wawancara • Analisis dokumen 	<p>kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, pendapatan asli daerah (PAD) dan status pemekaran wilayah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. PNS sebagai salah satu unsur dalam organisasi harus memiliki kompetensi yang memadai berdasarkan standar kompetensi jabatan dan analisis kebutuhan pelatihan, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dalam kinerja individu.</p>	<p><i>ICoGPASS The 4th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science Volume 2023. National Institute of Public Administration, School of Administration Jakarta DOI 10.18502/kss.v8i11.13 579</i></p>
19	Marliana Rahmawati Nurhanifah,	<ul style="list-style-type: none"> • SIPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Cobit 5.0 framework 	<p>Hasil penelitian juga menunjukkan</p>	<p><i>Techno Nusa Mandiri: Journal of Computing</i></p>

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
	Ganda Wijaya, Jajang Jaya Purnama (2023) <i>Audit of the Regional Development Planning Information System (SIPD) Using Cobit 5.0 Framework</i>			adanya kelemahan dalam tata kelola sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, yang ditemukan pada sub-domain APO07, dengan nilai tingkat kematangan terendah dibandingkan sub-domain lainnya, yaitu 1,86	<i>and Information Technology</i> Vol. 20, No. 1 March 2023 DOI: https://doi.org/10.33480/techno.v20i1.3541
20	Ade Nanda Saputri, Ratnawaty Marginingsih (2024) Pengaruh Kompetensi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Disiplin kerja • Kinerja Pegawai • Analisis data menggunakan SPSS • Regresi linier berganda 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan, secara parsial maupun secara simultan kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai	Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset Volume. 2 No. 4 Juli 2024 e-ISSN2988-5418; dan p-ISSN:2988-6031, Hal. 277-292 DOI: https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i4.1042
21	Febri Putri Astuti, Aris Eddy Sarwono (2023) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Terhadap <i>Fraud</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian intern • Kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fraud 	Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . Hal ini, H1 diterima, Semakin tinggi tingkat pengendalian internal	Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X 1 E-ISSN2579-3055 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
22	Anindya Rahmadani, A. Dahri Adi Patra Ls, Nispa Sari (2025) <i>Analysis Of Factors Affecting The Quality Of Financial Reports Of The Palopo City Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • Sistem pengendalian intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi informasi • Kualitas laporan keuangan • Data analisis SPSS 27 	meningkat maka akan menurunkan pencegahan <i>fraud</i> .	Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business P-ISSN: 2686-262X; E-ISSN: 2685-9300, 123Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Palopo
23	Depianti Nursin, Syamsuddin, Nirwana (2023) Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM • Sistem pengendalian Intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Teknologi Informasi • Pengelolaan keuangan dana desa • Kecerdasan Spiritual 	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, Kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan dana	Riset & Jurnal Akuntansi –ISSN : 2548-9224 p-ISSN : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
24	Elisa Putri Masni, Vita Fitriana Sari (2023) Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Pengendalian internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian kompensasi • Budaya organisasi • Kecurangan dana desa 	<p>desa, Kecerdasan spiritual memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan dana desa, Kecerdasan spiritual tidak mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana desa.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan dana desa, sedangkan akuntabilitas dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.</p>	<p>Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 5, No 1, Februari 2023, Hal 263-277, e-ISSN : 2656-3649 (Online), http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index</p>
25	Aenul Wahtan, Nurul Hayat, Sumarni (2025) Pengaruh Penerapan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan 	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial bahwa SIA tidak</p>	<p><i>Advances in management and financial reporting</i> vol 3, issue 3</p>

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
	Sistem Informasi Akuntansi kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi akuntansi • Kualitas sumberdaya manusia 	berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas sdm dan spi memiliki pengaruh signifikan	https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.530
26	Sella Mahcica Tiarno Gideon Setyo Budiwitjaksono (2023) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • Sistem pengendalian intern • Akuntabilitas • SEM-PLS 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan siskeudes 	Hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM dan SPIP tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan penggunaan siskeudes mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (DD).	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 7 No. 2, 2023, P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306
27	Adelia Putri, Tuti Meutia Literature Review : Pengaruh Audit Manajemen, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Terhadap Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Intern • GCG BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit manajemen • Peran audit internal 	Berdasarkan literatur, terlihat bahwa audit manajemen, sistem pengendalian internal, dan peran audit internal memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik <i>Good Corporate Governance</i>	JURNAL RISET AKUNTANSI Vol.2, No.2 Mei 2024 e-ISSN: 2985-7651; p-ISSN: 2985-6264, Hal 236-249 DOI: https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1785
28	Mohammad Ridwan, R. Ery W.A. Santosa, Sulistyو Suharto,	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	<i>Equilibrium Volume</i> 12. No. 1. Tahun 2023, Hal 92-101, eISSN 2684-9313,

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
	Anindya P.R.Z. Putri (2023) Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pengelola • Akuntabilitas pengelolaan dana desa • SEM-PLS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi informasi 	<p>kompetensi pengelolaan dana desa, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan negatif sebagai variabel moderasi antara kompetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan positif sebagai variabel moderasi antara sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas</p>	pISSN 2088-7485

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
29	Siti Nur Azizah, Muhammad Taufiq Hidayat (2023) Pengaruh Aakuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • SPI • Sistem Informasi akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi akuntansi SPI • Kinerja organisasi • Analisis data SPSS versi 20 	<p>pengelolaan dana desa.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi dan akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi</p> <p>Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan blt dana desa,</p>	<p>Journal of Student Research (JSR) Vol. 1, No. 2 Maret 2023</p> <p>e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 155-175, Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</p>
30	Adrianti, Sumarlin, Puspita Hardianti Anwar (2023) Pengaruh Akuntabilitas Dan	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Sistem pengendalian Intern 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa 	<p>Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan blt dana desa,</p>	<p>Income Journal: Accounting, Management and Economic Research, Volume 2, Number 1, April 2023 E-ISSN : 2985-4288,</p>

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
	Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa		• Analisis data regresi linier berganda	transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan blt dana desa, SPI tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan blt dana desa, SPI memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan blt dana desa	
31	Jane Nielsen, Lisa Eckstein, Dianne Nicol, and Cameron Stewart (2021) <i>Integrating Public Participation, transparency and accountability into Governance of Marketing Authorisation for Genome Editing Products</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Accountability • Keterlibatan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • <i>Governance of marketing</i> • <i>Genome editing Products</i> 	Kecepatan adopsi teknologi penyuntingan genom di laboratorium, serta kemunculan berbagai produk penyuntingan genom baru yang menjanjikan, semakin menegaskan urgensi pengembangan model tata kelola yang memadai	Scopus : frontier in political science Systematic Review published: 15 October 2021 doi: 10.3389/fpos.2021.747838
32	Rika Febby Rhamadhani, Friday Ogbu Edeh (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan Publik • Akuntabilitas 	• <i>Digital Governance</i>	Temuan penelitian menegaskan bahwa	Sinergi International Journal of Accounting & Taxation

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
	<i>Citizen Participation and Digital Governance in Public Sector accountability</i>			partisipasi warga negara, transparansi institusional, inovasi digital, serta mekanisme tata kelola yang inklusif merupakan strategi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas sosial	E-ISSN: 2988-1587 Volume. 2, Issue 4, November 2024 Page No: 200-210 : Universitas Tadulako dan Kampala University Uganda
33	Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, Arie Elcaputera (2024) Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Keterlibatan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Teknologi Digital • Pemberantasan Korupsi 	Temuan penelitian Pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, Promosi partisipasi publik, evaluasi dan pengawasan berkelanjutan,	Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.4 November 2024 e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal 321-334 DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553
34	Cristina Leston Bandeira, Sven T Siefken (2023) <i>The Development of Public Engagements as a core Institutional role for parliaments</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Core institutional Role</i> 	Melibatkan publik dalam pengambilan keputusan politik merupakan prasyarat utama bagi tata kelola demokrasi modern, dan parlemen berada pada	The Journal Legislative studies : ISSN: 1357-2334 (Print) 1743-9337 (Online) Journal homepage: www.tandfonline.com/journals/fjls20 DOI: 10.1080/13572334.2023.2214390

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
35	Bokyoung Shin, Jacqueline Floch, Mikko Rask, Peter Baeck, Christopher Edgar, Aleksandra Berditchevskaia, Pierre Mesure, Mathieu Branlat (2024) <i>A systematic analysis of digital tools for citizen participation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi literasi • Digital tools 	<p>posisi yang unik untuk melaksanakan tugas penting tersebut. Perkembangan yang terus berlangsung dalam masyarakat telah mendorong penguatan keterlibatan publik sebagai salah satu peran kelembagaan utama parlemen.</p> <p>alat digital memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi warga ketika didukung oleh desain institusional yang tepat. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai opsi dan keterbatasan alat digital sangat penting untuk mencapai tujuan tertentu</p>	<p><i>Scopus :Government Information Quarterly</i>, https://www.elsevier.com/locate/govinf https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101954</p>

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Keterangan Sumber
				serta memperlancar tahapan pembuatan kebijakan bersama warga	

2.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pegawai implementasi sistem pengendalian intern dan keterlibatan publik terhadap akuntabilitas dengan SIPD Sebagai Variabel Moderasi Survei Pada Pegawai Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Akuntabilitas pegawai pada pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal (personal) dan eksternal (lingkungan kerja). Kerangka pemikiran ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi akuntabilitas. Kompetensi mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang, organisasi (kelembagaan), atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya (Nurpala & Arrozi, 2023).

Pegawai yang kompeten, khususnya di unit keuangan pemerintah daerah, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat proses pengambilan keputusan. Kompetensi tidak terbatas pada latar belakang pendidikan semata, tetapi juga mencakup pelatihan berkelanjutan, pengalaman praktis, serta pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah (Sinosi et al., 2025). Kompetensi pengetahuan pemahaman teoretis dan prosedural yang di perlukan adalah hukum, Peraturan Daerah, kebijakan publik, tata kelola keuangan daerah. Dengan indikator pendidikan formal, penguasaan materi tugas, pemahaman regulasi (Gilbert et al., 2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun (2008), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai organisasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai, khususnya mengenai efektivitas kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alat digital memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi warga ketika didukung oleh desain institusional yang tepat (Shin et al., 2024). Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai opsi dan keterbatasan alat digital sangat penting untuk mencapai tujuan tertentu serta memperlancar tahapan pembuatan kebijakan bersama warga.

Akuntabilitas sebagai prinsip utama tata kelola yang baik, mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas dan penggunaan sumber daya mereka kepada para pemangku kepentingan, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar akuntansi (Mediaty et al., 2025).

Variabel Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tidak diasumsikan memengaruhi akuntabilitas secara langsung dalam model ini, melainkan berperan sebagai moderator. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik (2019). Sementara itu digitalisasi di sektor publik telah digadang-gadang bukan hanya sebagai cara untuk meningkatkan layanan, tetapi juga untuk memungkinkan ketersediaan data yang lebih luas, lebih kaya, dan lebih mudah diakses, serta interaksi yang lebih baik dengan aktor lain (Agostino et al., 2022).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kompetensi pegawai dan akuntabilitas. Kompetensi pegawai, yang mencakup pengetahuan,

keterampilan, dan sikap profesional, merupakan faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, tingkat efektivitas kompetensi tersebut dalam menghasilkan akuntabilitas yang tinggi sangat bergantung pada dukungan sistem informasi yang andal dan terpadu.

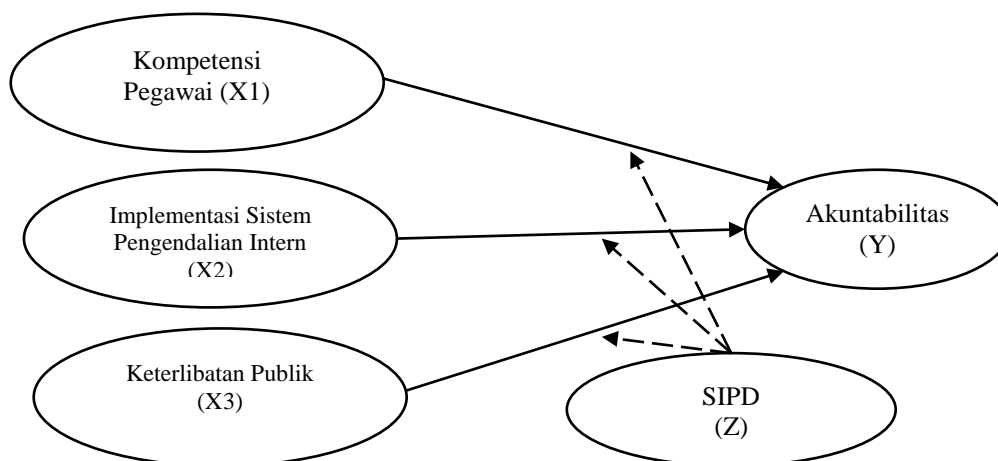
Dalam konteks ini, SIPD berfungsi sebagai alat bantu yang menyediakan akses terhadap data keuangan dan nonkeuangan secara transparan, akurat, dan real time. Ketika pegawai yang kompeten menggunakan SIPD secara optimal, maka kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas administrasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian, keberadaan SIPD memperkuat pengaruh kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas, karena sistem ini memungkinkan penerapan kompetensi secara lebih terukur, terdokumentasi, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta tanggung jawab publik. Sebaliknya, apabila pemanfaatan SIPD belum optimal, maka pengaruh kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas dapat melemah karena keterbatasan dukungan sistem dalam menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial dan administratif.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan instrumen penting dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas SPI dalam meningkatkan akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem informasi yang digunakan mampu mendukung penerapan prinsip-prinsip pengendalian tersebut. Dalam hal ini, SIPD berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara implementasi SPI dan akuntabilitas.

SIPD menyediakan platform terintegrasi untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Melalui sistem ini, unsur-unsur pengendalian intern seperti lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dapat berjalan lebih efektif karena seluruh proses tercatat dan terdokumentasi secara sistematis. Ketika implementasi SPI didukung dengan penggunaan SIPD yang optimal, maka proses pengawasan, audit internal, serta pertanggungjawaban

kinerja menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Dengan demikian, SIPD memperkuat pengaruh implementasi SPI terhadap akuntabilitas, karena sistem ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Sebaliknya, apabila pemanfaatan SIPD masih terbatas atau tidak diintegrasikan secara menyeluruh dalam pelaksanaan SPI, maka efektivitas pengendalian intern dalam meningkatkan akuntabilitas dapat berkurang akibat keterbatasan informasi, keterlambatan pelaporan, serta potensi kesalahan administratif.

Bagan berikut mengilustrasikan model konseptual penelitian yang akan diuji:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

1. Garis Lurus (\rightarrow): Menunjukkan pengaruh langsung (hipotesis utama).
2. Garis Putus-putus (\dashrightarrow): Menunjukkan pengaruh moderasi (memperkuat/memperlemah).
3. (+): Menunjukkan arah pengaruh yang positif.
4. (-): Menunjukkan arah pengaruh yang negatif

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

- H2:** Implementasi sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
- H3:** Keterlibatan publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
- H4:** SIPD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
- H5:** SIPD memoderasi pengaruh kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas.
- H6:** SIPD memoderasi pengaruh implementasi sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas.
- H7:** SIPD memoderasi pengaruh keterlibatan publik terhadap akuntabilitas.